

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Adnan Buyung Nasution, 2007, *Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan (Tinjauan, Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan Dan Perbandingan Di Berbagai Negara)*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Al-Mawardi, 1989, *Al-Ahkam As-Shulthaniyyah*, Cet. I, (Kuwait: Daar Ibn Qutaibah).
- A.P. Parlindungan, 1990, *Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah (Menurut Sistem Uupa)*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 1994, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 1998, *Komentar Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Abdurrahman Al-Maliki, 1963, *As-Siyasah Al-Iqtishadiyah al-Mutsala*, (T.Tp: T.P.).
- Afzalur Rahman, 2002, *Economic Doctrines of Islam (Doktrin Ekonomi Islam) Jilid 2*, Alih bahasa oleh Soeroyo dan Nastagin, Cet. II, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa)
- Ahmad Sukardja, 2012, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Azhary, 2003, *Negara Hukum (Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini)*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Bagir Manan, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cet. Ketiga, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Pt. Rajagrafindo Persada)
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, edisi revisi (Jakarta: Djambatan)

- Budi Harsono, 1971, Undang –Undang Pokok Agraria: Sejarah Penyusunan, Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid II, Djambatan, Jakarta.
- _____, 1994, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid I (Hukum Tanah Nasional), Djambatan, Jakarta.
- Hilaire Barnett, 2011, *Constitutional & Administrative Law, Eight Edition, Routledge*, London And New York.
- Dadang Kahmad, 2000, *Metode Penelitian Agama*, Cv Pustaka Setia, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Erna Sri Wibawanti dan R.Murjiyanto, 2013. Hak Atas Tanah Dan Peralihannya, Liberty, Yogyakarta.
- H. D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt, 1988, *Hoofdstukken Van Administratief Recht*, Uitgeverij Lemma Bv, Culemborg.
- Husein Alting, 2010, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Tanah (Masa Lalu, Kini Dan Masa Mendatang)*, Lembaga Penerbitan Universitas Khairun, Ternate.
- Ida Nurlinda, 2009, *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum*, Edisi I, PT. Raja Grafindo Persada.
- Idris Ahmad, 1986, *Fiqh Al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah).
- I Gede Wiranata, 2004, *Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ija Suntana, 2011, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Cet. I, (Bandung: Pustaka Setia).
- Iman Sudiyat, 1982, *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah Di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Imam Sutiknjo, 1994, *Politik Agraria Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

- Indroharto, 1991, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).
- Irawan Soerodjo, 2014, *Hak Pengelolaan Atas Tanah (Hpl)*, Laksbang Mediatama, Sleman
- J. J. H. Bruggink, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih bahasa B. Arief Sidharta, (Jakarta: Citra Aditya Bhakti).
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang.
- Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Bayumedia Publising, Malang.
- Lexy J. Meleong, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Maria S.W. Soemarjono, 1998, *Kewenangan Negara Untuk Mengatur Dalam Konsep Penguasaan Tanah Oleh Negara*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 14 Februari, Yogyakarta
- _____, 2001, *Kebijakan Tanah: Antara Regulasi Dan Implementasi*, Cetakan 1, (Jakarta : Kompas).
- Nasrun Haroen, , 2000, *fiqh muamalah*, cet.1, (jakarta: gaya media pratama).
- Notonagoro, 1984, *Politik Hukum Dan Pembangunan Agraria Di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Yang Berdasarkan Atas Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fhui, Jakarta, 17 November 1979.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- _____, 2011, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Ke-7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ria Fitri, *Tinjauan Tanah Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam (The Overview On Unattended Land In Islamic Law Perspective)*, (Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Tt).
- Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R.J.H.M. Huisman, 1995, *Algemeen Bestuursrecht, Een Inleiding*, Kobra, Amsterdam.
- Sayyid Sabiq, 2008, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, Alih Bahasa Oleh Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Alma'arif)
- Sabahuddin Azmi, 2005, *Menimbang Ekonomi Islam*, (Bandung: Nuansa)
- S.F Marbun Dan Moh.Mahfud Md, 1989, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty*, Yogyakarta.
- Sjahan Basah, 1997, *Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Alumni Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Radjawali.
- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta.
- _____, Dan Soleman B. Taneko, 2001, *Hukum Adat Indonesia, Cetakan Keempat*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Soemantri M, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit P.T Alumni, Bandung.
- Suharningsih, 2009, *Tanah Terlantar*, Penerbit Prestasi Pustaka Raya, Jakarta.
- Sulaiman Rasjid, 2011, *Fiqh Islam*, Cet. 52, (Bandung: Sinar Baru Algensindo).
- Supriyadi, 2006, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Taqyuddin An-Nabhani, 2000, *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam (Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Cet. V, Alih bahasa oleh Moh. Maghfur Wachid*, (Surabaya: Risalah Gusti)

Ter Haar BZN, 1981, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K.Ng Soebakti Poesponoto, PT. Pradnya Paramita.

Urip Santoso, 2005, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Edisi pertama, Prenada Media, Jakarta.

Van Dijk, 1979, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, diterjemahkan oleh A. Soehardi, Bandung : Sumur.

Yudhi Setiawan, 2009, *Instrumen Hukum Campuran (Gemeenschapelijkrecht) Dalam Konsolidasi Tanah*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, (Selanjutnya Disebut Yudhi Setiawan I).

_____, 2010, *Hukum Pertanahan, Teori dan Praktik*, Bayumedia Publishing, Malang.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang No.4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Pemukiman.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan .

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah.

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional.

C. Jurnal Atau Makalah

Kurnia Warman, 1998, *Konversi Hak Atas Tanah Ganggam Bauntuak, menurut UUPA di Sumatra Barat*, (Tesis Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta;).

M. Ridwan, Hak Kepemilikan Rakyat Dan Negara Atas Tanah, *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat Stain Purwokerto* Vol. 6 No. 2 April 2009.

Rendy Octavianus Dumais, Pengaturan Hukum Terhadap Keberadaan Tanah Terlantar Di Indonesia, *Lex Et Societatis*, Vol. II/No. 5/Juni/2014.

Risnarto & Moshedayan Pakpahan, *Makalah Diskusi Riset Kebijakan Pertanahan Tentang Pelaksanaan Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*, Semarang, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, 2005.

Supriyanto, Kreteria Tanah Terlantar Dalam Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.10 No.1 Januari 2010.

D. Internet

Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, Fikih Politik Menurut Imam Hasan Al - Banna, [Http://Www.Eramuslim.Com](http://Www.Eramuslim.Com) / Manhaj - Dakwah/Fikih Siyasi/Kepemimpinan Negara Dalam islam. Htm#.Utceajg9wso, Diakses Tanggal 25 Februari 2017.

Pangiuk Ambok. "Tanah Terlantar Dalam Hukum Dan Kemaslahatan". Dalam [Http://Kontekstualita.Com](http://Kontekstualita.Com) Diakses Tanggal 13 Februari 2017.

U.Maman KH. M.Si hukum-hukum seputar tanah dalam <http://www.pusbangsite.com/?p=1375>, diakses tanggal 26 Februari 2017.

E. Wawancara

Fitri adhi nugroho, Wawancara, seksi bidang pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat kantor pertanahan kabupaten Demak, Demak, 08 Maret 2017.